DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN SINGKAT
KOMISI V DPR RI
(BIDANG PERHUBUNGAN, PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT, PEMBANGUNAN PEDESAAN DAN KAWASAN TERTINGGAL, BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA, BADAN SAR NASIONAL, DAN BPLS)

Tahun Sidang	:	2009 - 2010
Masa Sidang	:	II
Rapat	:	Ke – 10 (sepuluh)
Jenis Rapat	:	Rapat Dengar Pendapat
Hari/Tanggal	:	Selasa, 2 Februari 2010
Sifat	:	Terbuka
Pukul	:	13.30 WIB s.d 16.10 WIB
Tempat	:	Ruang Rapat Komisi V (Ruang KK V)
Acara	:	1. Evaluasi Program/kegiatan Tahun Anggaran 2009 2. Persiapan program/kegiatan Tahun Anggaran 2010
Ketua Rapat	:	Drs. Yoseph Umarhadi, Msi, MA
Sekretaris	:	Dra. Hani Yuliasih
Hadir Anggota	:	dari 53 orang Anggota Komisi V DPR RI
Hadir Mitra	:	Kepala Badan SAR Nasional beserta jajaran terkait

KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT

I. PENDAHULUAN

1. Rapat dibuka pukul 13.30 WIB setelah kuorum terpenuhi dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Ketua menyampaikan agenda rapat kerja hari ini adalah evaluasi program/kegiatan Tahun Anggaran 2009 dan persiapan program/kegiatan Tahun Anggaran 2010 dari Badan SAR Nasional.
3. Ketua mempersilakan Kepala Badan SAR Nasional untuk menyampaikan paparannya.
4. Ketua mempersilakan anggota Komisi V untuk menyampaikan tanggapan atau pertanyaan.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT

1. Terkait penyerapan APBN TA 2009 per 31 Desember 2009 sebesar Rp 523 Miliar atau 88,35 % Kinerja Keuangan dari Total DIPA TA 2009 sebesar Rp 592 Miliar, Komisi V DPR RI mendesak Basarnas untuk meningkatkan kinerja keuangan agar pada akhir Tahun Anggaran 2010 mendapatkan penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan.
2. Komisi V DPR RI prihatin terhadap menurunnya alokasi anggaran untuk kegiatan Basarnas dimana dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 hanya dialokasikan sebesar Rp 4,47 Triliun dari total Kebutuhan sesuai Rencana Strategis (Renstra) Basarnas sebesar Rp 10,8 Triliun atau hanya sebesar 41,39 %. Seiring dengan upaya peningkatan Kinerja Basarnas, Komisi V DPR RI mendukung terhadap upaya pemberdayaan Basarnas.

3. Komisi V DPR RI meminta Basarnas agar segera menyelesaikan atau menyampaikan Rencana Strategis (Renstra) 2010-2014 yang telah disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Pemerintah 2010-2014.

4. Komisi V DPR RI menegaskan kembali kepada Basarnas agar melakukan pengkajian penggunaan asuransi terhadap sumber daya manusia dan aset bergerak milik Basarnas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Terkait dengan kebutuhan payung hukum dan landasan operasional serta dalam rangka peningkatan layanan SAR kepada masyarakat, Komisi V DPR RI meminta Basarnas untuk segera menyampaikan materi-materi Naskah Akademik dan Draft Rancangan Undang-Undang tentang Pencarian dan Pertolongan.

6. Terkait pemblokiran anggaran (tanda bintang) pada DIPA 2010 di Basarnas sebesar Rp 95,5 Miliar, Komisi V DPR RI mendesak Basarnas untuk segera menyiapkan dan memenuhi seluruh persyaratan/prosedur pencairan kepada Kementerian Keuangan. Selanjutnya Komisi V DPR RI meminta Basarnas untuk meminimalkan kejadian serupa dengan melakukan perbaikan proses penyusunan dan perencanaan program/kegiatan.

7. Komisi V DPR RI mendesak Basarnas untuk menempuh langkah-langkah penyelesaian permasalahan penahanan Mesin *Rescue Boat Fiberglass Type 36M* oleh Bea Cukai dan permasalahan pembelian Gedung Merpati untuk Kantor Pusat Basarnas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya Komisi V DPR RI akan melakukan pendalaman terkait proses pengadaan Mesin *Rescue Boat Fiberglass Type 36M* dan Gedung Merpati dari awal hingga pada kondisi sekarang.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 16.10 WIB.

Jakarta, 2 Februari 2010

KETUA RAPAT,

ttd

DRS. YOSEPH UMARHADI, MSi, MA